

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintahan Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat bersifat ambivalen. Di satu sisi, masyarakat mengakui adanya manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta bantuan bagi sektor ekonomi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Rahmat Yasin memperoleh legitimasi karena mampu memberikan hasil yang dirasakan langsung.
2. Isu hukum menjadi sumber kritik utama. Kasus korupsi dan keberlanjutan kekuasaan keluarga Yasin menurunkan kepercayaan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya menghapus legitimasi kepemimpinan tersebut.
3. Faktor kedekatan dengan masyarakat memperkuat hegemoni. Strategi komunikasi dan keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan, meski lebih banyak bersifat simbolis, tetap membuat masyarakat merasa diperhatikan sehingga konsensus tetap berjalan.
4. Temuan ini sejalan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, di mana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui dominasi, tetapi juga melalui konsensus (consent). Hegemoni politik Rahmat Yasin bertahan meski menghadapi kontradiksi, karena masyarakat masih melihat adanya manfaat dari kepemimpinannya.
5. Teori persepsi sosial dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kepemimpinan Rahmat Yasin dan keluarganya terbentuk melalui pengalaman langsung, informasi sosial, serta harapan dan stigma yang pada akhirnya menentukan legitimasi politik lokal.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

- Perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kepercayaan publik tidak hanya bertumpu pada hasil pembangunan fisik, tetapi juga pada integritas pemimpin.
- Melibatkan masyarakat secara lebih substansial dalam perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai tenaga pelaksana, agar tercipta partisipasi yang lebih bermakna.

2. Bagi Masyarakat

- Penting untuk meningkatkan kesadaran politik kritis agar tidak hanya menilai pemimpin dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari rekam jejak, integritas, dan akuntabilitasnya.
- Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini masih terbatas pada studi kasus di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut yang membandingkan dinamika dinasti politik di daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- Diperlukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana faktor media, budaya lokal, dan struktur ekonomi-politik berperan dalam membentuk hegemoni politik di tingkat daerah.